

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara dengan kapabilitas sebagai *superpower* atau adikuasa setelah menjadi salah satu pemenang Perang Dunia II, sehingga memiliki *privilege* dalam mengatur keamanan internasional dengan mengatasnamakan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Internasional. Amerika Serikat memiliki paham liberalisme yang menjadikan demokrasi sebagai sistem politiknya, dan kapitalisme sebagai sistem ekonomi, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Negara dengan luas wilayah mencapai 9.83 juta kilometer persegi ini memiliki 50 negara bagian yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur yang menjabat sebagai Kepala Negara Bagian dan Kepala Pemerintahan Negara Bagian. Jumlah penduduk Amerika Serikat pada 2017 mencapai 326.625.791 jiwa yang menjadikan Amerika Serikat sebagai negara terbesar ketiga di dunia dan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia. Secara geografis, Amerika Serikat di darat berbatasan dengan Kanada di utara dan Meksiko di selatan. Sedangkan di timur ada Samudera Atlantik dan sebelah barat terdapat Samudera Pasifik. Namun, terdapat dua negara bagian yang terpisah dari daratan utama Amerika yaitu negara bagian Alaska yang letaknya berada di ujung benua Amerika Utara yang dekat dengan bagian barat Rusia dan satu negara bagian yang terpisah adalah Hawaii yang berada di Samudera Pasifik (Geost, 2017).

Republik Konstitusional Federal merupakan sistem pemerintahan Amerika Serikat dimana Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dipilih setiap 4 tahun sekali dan dapat dipilih kembali dengan maksimal 2 periode menjabat. Terdapat 2 Partai besar di Amerika Serikat yang mendominasi yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Masing-masing Presiden dari kedua Partai besar tersebut memiliki pandangan, keputusan, maupun kebijakan yang berbeda-beda. Termasuk politik luar negeri yang akan menentukan sikap negara Amerika Serikat dalam menyikapi permasalahan internasional. Dalam menjalankan politik luar negeri, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang menjadi dasar untuk menjalankan strateginya di perpolitikan internasional (Polsby, 2012).

Amerika Serikat dalam perjalanannya selalu memiliki target kepentingan tersendiri di dunia internasional. Salah satu strategi Amerika yang bisa ditinjau dalam upayanya memenuhi kepentingan itu adalah bagaimana hegemoni Amerika memainkan peran penting sebagai alat untuk mempengaruhi negara-negara lain, yaitu dengan menunjukkan dominasi atas negara lain melalui klaim sepihak secara langsung maupun tidak langsung. Setiap negara yang aktif dalam politik internasional sering memberikan tanggapan terhadap situasi internasional yang sedang terjadi, begitu pula Amerika Serikat. Tanggapan dari Amerika terhadap

situasi internasional bisa merubah situasi internasional secara masif mengingat Amerika merupakan negara besar yang memiliki pengaruh kuat terhadap dunia internasional. Respon yang diberikan oleh Amerika Serikat sebenarnya dilandasi beberapa faktor seperti yang negara-negara lain lakukan dalam interaksi internasional. Faktor tersebut meliputi struktur sistem internasional, persepsi elit politik, strategi negara lain, dan kapabilitas dalam negeri (Lovel, 1970).

Dalam menjalankan pemerintahan demokratis, pergantian kekuasaan di Amerika Serikat dilakukan dengan pemilihan umum untuk menunjuk Presiden terpilih yang nantinya akan memiliki kebijakan-kebijakan yang akan menimbulkan dampak yang berbeda. Setiap Presiden yang terpilih dari masing-masing partai selalu memiliki terobosan dan pola kebijakan berbeda. Maka dari itu, pergantian presiden akan sangat menentukan bagaimana nantinya Amerika Serikat akan bersikap sebagai salah satu aktor penting dalam hubungan internasional. Sebagai contoh, Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama mengeluarkan Strategic Patience Approach dalam mengatasi isu nuklir di Korea Utara (DePetris, 2016). Dimana dalam kebijakannya tersebut Obama lebih menekankan diplomasi yang halus dan tidak tergesa-gesa. Menunggu Korea Utara untuk memiliki kesadaran sendiri dalam upaya untuk menghentikan program nuklir yang selama ini dijalani. Namun, berbeda dengan Barack Obama, Presiden Donald Trump memiliki upaya tersendiri dalam memandang persoalan nuklir Korea Utara. Kebijakan maupun strategi yang dilakukan tentu akan berbeda mengingat Donald Trump dan Barack Obama berasal dari Partai yang berbeda dan memiliki strategi yang juga berbeda.

Donald John Trump merupakan presiden terpilih Amerika Serikat yang dilantik pada 20 Januari 2017. Menjadikannya presiden ke-45 negara adikuasa tersebut serta menjadi harapan baru publik amerika dalam menghadapi problem-problem yang belum terselesaikan. Trump berasal dari New York tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Ayahnya merupakan pengusaha dibidang property dan keturunan jerman sedangkan ibunya berdarah skotlandia. Pendidikan Donald Trump semasa muda berada di NYMA (New York Military Academy), Universitas Fordham di Bronx, dan Wharton School, Universitas Pennsylvania, Philadelphia. Trump juga mengawali karir di dunia property melalui perusahaan milik ayahnya, Elizabeth Trump and Son dan bergerak di bidang penyewaan rumah untuk kalangan menengah. Selain dikenal sebagai pebisnis handal, Presiden Trump juga memiliki bakat di dunia entertainment, karena Trump pernah beberapa kali muncul pada acara TV atau Film seperti Home Alone 2, The Nanny, The Little Rascals, bahkan Trump juga pernah tampil di ajang WWE, acara gulat terkenal asal Amerika Serikat. (Editor, 2021) Namun, kepopuleran Donald Trump tidak luput dari kontroversi-kontroversi yang mengikutinya. Isu rasis Trump seringkali menjadi pembicaraan publik dimana beberapa kebijakan yang dibuat oleh Trump selama memimpin Amerika Serikat dianggap mendiskriminasi ras tertentu. Sama halnya dalam membuat kebijakan luar negeri, Trump sering membuat kontroversi dengan diplomasi yang khas yaitu melalui media sosial pribadinya dan pidato di berbagai

kesempatan. Terutama kebijakannya terhadap Korea Utara yang sempat membuat hubungan kedua negara memanas.

Amerika Serikat dan Korea Utara bisa dikatakan memiliki hubungan yang tidak harmonis jika dilihat dari perjalanan sejarah. Pasca Perang Dunia II, tepatnya tahun 1948 Korea terbagi menjadi dua yaitu Korea Utara dan Korea Selatan (Fathoni, 2017). Kedua wilayah Korea tersebut dikendalikan atau dikuasai oleh dua negara pemenang Perang Dunia II Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mulai dari titik ini dinamika hubungan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara menjadi kurang baik akibat dari pengaruh ideologi politik dari Uni Soviet. Batas wilayah antara Korea Utara dan Korea Selatan disebut dengan 38th parallel. Sebelah selatan 38th parallel merupakan wilayah Korea Selatan yang dikuasai oleh Amerika Serikat sedangkan sebelah utara 38th parallel dimiliki oleh Korea Utara yang dikuasai oleh Uni Soviet (Fry, 2013). Dengan adanya Uni Soviet di kawasan Utara maka saat itu pula terjadi pengenalan-pengenalan ilmu maupun teknologi ke Korea Utara termasuk pengenalan teknologi nuklir.

Pembagian wilayah kekuasaan Korea Utara dan Korea Selatan sering kali menimbulkan konflik. Perang pun tak bisa dihindari hingga akhirnya pada tanggal 25 Juni 1950 kedua negara memulai Perang. Perang Korea berlangsung sekitar 3 tahun dan diakhiri dengan gencatan senjata. Hingga saat ini Korea Utara dan Korea Selatan belum melakukan perjanjian Perdamaian, sehingga proses penyatuan kembali (unifikasi) Korea pun tidak terlaksana. Meskipun sempat mengadakan pertemuan untuk membahas perjanjian perdamaian, namun usaha yang dilakukan selalu menemui masalah dan mengalami jalan buntu. Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan dari sini berlanjut hingga Korea Utara mengembangkan program nuklir yang didapat dari Uni Soviet dan pengembangannya berkembang pesat. Sehingga teknologi nuklir yang dikembangkan Korea Utara mereka gunakan sebagai alat untuk bargaining di dunia internasional. Program senjata nuklir tersebut juga bisa digunakan jika sewaktu-waktu mendapatkan ancaman dari pihak Amerika Serikat yang selama ini menjadi musuh Korea Utara.

Program Senjata Nuklir Korea Utara sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Kim Jong Il, pada tahun 2003 setelah Korea Utara keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi untuk pembatasan penggunaan nuklir. Ketika pada perundingan dengan Six Party Talks tahun 2006, Korea Utara menyetujui untuk menghentikan pengembangan hulu ledak nuklirnya yang berjumlah 2 dengan syarat Korea Utara mendapat keringanan sanksi dan bantuan dari negara Six Party Talks (Purwono & Zuhri, 2010). Sebetulnya, Korea Utara telah mendapat banyak peringatan maupun sanksi dari dunia internasional terkait Program Nuklir mereka. Namun, pada kenyataannya Korea Utara tetap menjalankan pengembangan nuklir mereka yang membuat Komunitas Internasional khawatir dan negara-negara yang berdekatan dengan Korea Utara terutama Korea Selatan dan Jepang.

Ketika Kim Jong Un naik tahta menggantikan ayahnya Kim Jong Il, Program Nuklir Korea Utara tetap berjalan dan Kim Jong Un berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan nuklir yang sebelumnya telah dijalankan oleh ayahnya. Kim Jong Un mengembangkan hulu ledak nuklir yang lebih mematikan dan lebih

besar dari sebelumnya. Pada 2015 Kim Jong Un mengklaim bahwa telah berhasil mengembangkan hulu ledak nuklir berbahan Termonuklir yang kemudian menuai protes keras dari Komunitas Internasional. Hingga pada akhirnya di tahun 2016, Kim Jong Un berhasil melaksanakan uji coba hulu ledak nuklir pertamanya dan membuat kepanikan dunia internasional terutama Korea Selatan. Dampak dari uji coba nuklir ini berakibat pada gempa berkekuatan 5.6 Magnitudo yang dirasakan Korea Selatan. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Amerika Serikat karena Korea Selatan merupakan sekutu bagi Amerika (Masterson, 2020).

Pada tahun 2017, ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara kian memanas lantaran pada 2 Januari 2017, Kim Jong Un dalam pidatonya menyebut pengembangan nuklir *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) telah sampai pada tahap akhir. Pengembangan tersebut ditanggapi oleh Pemerintahan Trump pada April 2017, dengan mengadakan rapat kongres untuk menghasilkan kebijakan strategi *Maximum Pressure* terkait Korea Utara dan pada akhirnya mengeluarkan sanksi lebih berat terhadap Korea Utara sebagai upaya penekanan terhadap program nuklir mereka. Selain itu Amerika juga bekerjasama dengan aliansi internasional dalam upaya diplomasi terkait denuklirisasi Korea Utara (Masterson, 2020). Selanjutnya pada Agustus 2017, Amerika Serikat dan Korea Selatan Mengadakan Latihan Militer Bersama karena tensi yang sedang memanas di Semenanjung Korea. Pada saat itu pula Korea Utara tengah mengembangkan tes nuklir ke-6 mereka. Situasi ini menjadi semakin panas dan meningkatkan kemungkinan terjadinya perang antara Amerika dan Korea Utara.

Namun, pada awal 2018 ternyata kondisi yang tadinya panas mulai menunjukkan penurunan yang signifikan. Ditandai dengan kebijakan Korea Utara yang memulai kembali hubungan baik dengan pemerintahan Korea Selatan, dimana mereka setuju untuk ikut berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang. Pertemuan antara Korea Utara dan Korea Selatan pada April 2018 yang dikenal sebagai Inter-Korean summit ini juga menjadi awal yang baik. Dalam pertemuan yang diadakan di Peace House tersebut Kim Jong Un dan Moon Jae In membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan kedua negara. Salah satunya adalah denuklirisasi di semenanjung Korea. Tanggal 27 April 2018, telah ditandatangani Deklarasi Panmunjom yang menandakan berakhirnya perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam Deklarasi Panmunjom juga disebut mengenai reunifikasi antara dua negara yang sudah lama terpisah. Dengan melunaknya sikap Korea Utara tersebut, Amerika Serikat bergerak cepat dengan mengirim utusannya ke Pyongyang guna membahas pertemuan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara demi penyelesaian Krisis Korea Utara. Dengan upaya diplomasi panjang akhirnya Amerika Serikat dan Korea Utara dapat bertemu pada 12 Juni 2018 di Singapura. Pertemuan historis ini menjadi Langkah awal dalam memulai hubungan baik antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

Korea Utara menunjukkan kemajuan dalam mengupayakan denuklirisasi Semenanjung Korea dengan beberapa tindakan. Setelah ditandatanganinya *Joint Statement* antara Donald Trump dan Kim Jong Un dalam US-North Korea Summit 2018 di Singapura, Propaganda yang selama ini dijalankan Korea Utara dihentikan.

Setiap tanggal 27 Juli, Korea Utara rutin melakukan kampanye “anti-US Imperialism” yang merupakan propaganda untuk merusak citra Amerika Serikat di mata masyarakat Korea Utara (Ho, 2018). Namun setelah perjanjian antara Trump dan Kim, propaganda tersebut dihentikan. Lalu pada tanggal 27 Juli 2018, kampanye propaganda tahunan Korea Utara diubah menjadi agenda pemulangan 55 peti jenazah tentara Amerika Serikat yang menjadi korban Perang Korea (Macias, 2018). Menurut catatan sejarah, banyak tentara AS yang gugur di Perang Korea dengan total lebih dari 30.000 korban jiwa. Namun gestur yang diberikan Korea Utara dengan memulangkan 55 korban yang teridentifikasi sebagai tentara AS merupakan wujud keseriusan Korea Utara dalam mengupayakan denuklirisasi. Kemudian Korea Utara juga menghancurkan dua fasilitas nuklir mereka di dekat Pyongyang dan Tonchang. Pada 24 Juli 2018, Korea Utara telah menutup fasilitas atau pabrik *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) Hwasong-15 yang pernah diluncurkan pada 29 November 2017 (Yong-in, 2018). Pada hari berikutnya, tepatnya 25 Juli 2018, Korea Utara juga menghancurkan fasilitas nuklir Tonchang yang merupakan tempat pembuatan serta peluncuran Satelite Kwangmyongsong Korea Utara (Joseph, 2018).

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut: ***“Bagaimana Upaya Diplomasi Amerika Serikat era Donald Trump dalam Krisis Nuklir Korea Utara tahun 2017-2018?”***

C. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya menjelaskan atau menjawab dari rumusan masalah, maka perlu adanya sebuah landasan yang berupa konsep ataupun teori. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui apa itu konsep maupun teori. Konsep menurut Mohtar Mas'ood adalah sebuah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu (Mas'ood, 1990). Penulis akan menjawab permasalahan tentang bagaimana Diplomasi Amerika Serikat terhadap Krisis Nuklir Korea Utara 2017-2018 menggunakan analisis konseptual dibantu teori.

Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu instrument penting dalam melaksanakan kepentingan nasional suatu negara. Sebagai alat utama suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional, diplomasi selalu berkaitan dengan hubungan anatar negara maupun organisasi internasional. Pada umumnya, diplomasi merupakan Langkah awal suatu negara yang ingin menjalin hubungan bilateral sebagai permulaan mengembangkan hubungan selanjutnya.

Secara konvensional, pengertian diplomasi menurut K.M Panikar dalam buku *The Principle and practice of Diplomacy* menyatakan bahwa diplomasi di hubungan internasional adalah seni yang mengedepankan proses-proses damai dalam mencapai kepentingan nasional negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. R.W. Sterling dalam buku *Macropolitics* menyebut, Biasanya diplomasi dilaksanakan dengan proses negosiasi maupun perjanjian. Namun, jika cara damai tersebut tidak bisa memberikan tujuan yang diinginkan maka,

diplomasi bisa dilakukan dengan cara penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasional (Roy, 1995).

Suatu relasi, komunikasi, dan keterkaitan hubungan bisa diartikan sebagai diplomasi. Selain itu diplomasi juga disebut sebagai proses interaktif dua arah antar negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara (Roy, 1995). Bisa dipahami bahwa Diplomasi dan politik luar negeri adalah dua hal yang berbeda. Namun, Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang sehingga dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Perkembangan diplomasi akan terus terjadi seiring dengan meningkatnya ketergantungan antar negara. Dalam kegiatan diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan cara negosiasi disamping bentuk kegiatan diplomasi lainnya, seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara.

Dalam upaya penyelesaian konflik secara damai, Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar. Diplomasi dilakukan sebagai salah satu cara mencapai kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi biasanya dilakukan pada situasi yang kondusif dan menggunakan cara-cara damai. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung (Watson, 1984).

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui interaksi guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional.

Teori Diplomasi Koersif

Dalam buku *The Limits of Coercive Diplomacy* karya Alexander George, Diplomasi Koersif merupakan salah satu instrumen yang digunakan negara yang mana didalamnya ancaman, persuasi, bujukan, dan akomodasi yang terintegrasi ke dalam suatu strategi dalam krisis yang menjadi instrumen alternatif bagi seorang elit politik selain perang dan upaya militer. Diplomasi Koersif berbeda dengan strategi perang yang dimaksudkan untuk meniadakan

kekuatan lawan untuk bersaing dalam suatu keadaan krisis, melainkan merupakan suatu strategi politik-diplomasi yang bertujuan untuk mempengaruhi motivasi dan struktur insentif pihak lawan. Strategi yang melibatkan ancaman dan penggunaan tekanan ini dilakukan demi mencapai proses lebih lanjut. Tujuannya adalah membuat pihak lawan mau memenuhi tuntutan atau melakukan kompromi guna mencegah terjadinya eskalasi konflik. George menambahkan, Diplomasi Koersif berbeda dengan *deterrence* yang melibatkan ancaman untuk mencegah pihak lawan memulai tindakan yang tidak diinginkan. Diplomasi Koersif justru merupakan respon dari tindakan yang telah dilakukan oleh pihak lawan (George, 2008).

Teori yang dikemukakan oleh Alexander George kemudian di perdalam oleh Bruce Jentleson yang menjelaskan terdapat dua faktor penentu keberhasilan Diplomasi Koersif, yaitu *coercer state* (pihak penekan) dan *target state* (pihak tertekan) (Whytok, 2005). Namun penulis akan berfokus pada strategi *coercer state* yang mana Amerika Serikat sebagai pihak penekan terhadap Korea Utara dalam Krisis Nuklir. Karena Amerika Serikat merupakan negara yang kuat di hampir segala bidang dengan hegemoninya di Semenanjung Korea maupun internasional dan Korea Utara sebagai pemicu konflik yang terjadi.

Terdapat tiga aspek yang menjadi variabel pembahasan dalam konsep pendekatan *coercer state strategy* sebagai pihak penekan (Whytok, 2005), diantaranya:

1. Aspek *proportionality*
Coercer state harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan instrumen apa yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. *Coercer state* harus mengerti bahwa semakin besar kebutuhan atau tuntutan negara penekan terhadap *target state* (negara tertekan) maka strategi harus terukur agar *target state* bisa patuh.
2. Aspek *reciprocity*
Coercer state mampu untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa setelah tuntutan dipenuhi oleh *target state*, maka imbalan akan diberikan *coercer state* atau imbalan diberi lalu tuntutan harus dipenuhi. Pada intinya adalah hubungan antar kedua belah pihak harus saling menguntungkan (*something to something*).
3. Aspek *coercive credibility*
Dalam upaya membangun kesepakatan atau kerjasama, perlu adanya pertimbangan konsekuensi akan penolakan. *Coercer state* harus bisa melakukan tekanan, paksaan, ancaman, kekerasan, maupun instrumen koersif lainnya seperti sanksi ekonomi. Hal tersebut dilakukan agar *target state* dapat menimbang *costs* bila tidak patuh.

Amerika Serikat memiliki berbagai macam cara dalam melaksanakan kebijakan politik luar negerinya. Salah satu cara yang ditempuh Donald Trump dalam menanggapi Krisis Nuklir Korea Utara tahun 2017-2018 adalah melalui

kebijakan *Maximum Pressure*. Seiring dengan dinamika perkembangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara dapat terlihat kebijakan-kebijakan Donald Trump yang cukup provokatif dalam menanggapi pengembangan nuklir oleh Kim Jong Un. Pada 19 september 2017, bertempat di Sidang Umum PBB Donald Trump memberi ancaman akan menghancurkan Korea Utara. Hal ini terkait dengan uji coba nuklir Korea Utara yang telah memancing reaksi dari dunia internasional khususnya Amerika. Pemberian sanksi dari Amerika Serikat pernah dilakukan dan akan berlanjut. Statement ancaman antara Donald Trump dan Kim Jong Un terus berlanjut dan dapat memberikan dampak yang beresiko untuk kedepannya terutama bagi dunia internasional.

Dengan adanya ancaman antara kedua pemimpin negara tersebut, maka upaya diplomasi yang telah dikemukakan sebelumnya yang tepat menurut penulis dalam menjelaskan fenomena tersebut adalah Trump menggunakan upaya diplomasi koersif dalam bentuk *coercer state strategy* untuk melaksanakan *Maximum Pressure* terhadap Korea Utara. Berdasarkan dinamika hubungan yang panas antara Amerika Serikat dan Korea Utara pada tahun 2017-2018, penulis melihat bahwa Amerika Serikat memanfaatkan momen dimana Korea Utara sedang dilanda banyak tekanan dari dunia internasional dan juga sanksi-sanksi yang diberikan. ancaman yang dilakukan Donald Trump adalah sebagai salah satu cara Amerika Serikat menekan Korea Utara untuk segera menghentikan upaya pengembangan nuklirnya dan mematuhi peraturan internasional. Dan Amerika juga tidak segan untuk memberikan konsekuensi untuk Korea Utara jika masih melanjutkan pengembangan nuklir mereka berupa sanksi tambahan.

D. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan merumuskan hipotesa dengan didukung oleh teori maupun konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perumusan hipotesa yang dapat ditarik sebagai kesimpulan sementara adalah;

- 1) Amerika Serikat sebagai *coercer state* memiliki tujuan melakukan upaya denuklirisasi terhadap Korea Utara melalui kebijakan *Maximum Pressure*.
- 2) Amerika Serikat memberikan jaminan kepada rezim Korea Utara jika menyetujui kesepakatan denuklirisasi dengan memberikan bantuan maupun pelonggaran sanksi.
- 3) Amerika Serikat akan melakukan ancaman kepada Korea Utara berupa tekanan maupun sanksi ekonomi jika tidak menghentikan program nuklir.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi tentang Diplomasi Amerika Serikat era Donald Trump dalam krisis nuklir Korea Utara dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Donald Trump terhadap pengembangan program nuklir Korea Utara. Penelitian ini juga sebagai sarana dalam memahami setiap bentuk dinamika yang terjadi dalam

Krisis Nuklir Korea Utara tahun 2017-2018. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat tugas akhir kuliah Sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, dimana penelitian ini berdasar pada analisis non-numerik dari fenomena atau kejadian. Dengan mengumpulkan beberapa data yang didapatkan dari berbagai sumber yang tersedia dan berkaitan dengan topik yang diteliti sehingga mampu membantu menganalisis upaya maupun kebijakan Amerika Serikat terkait Krisis Nuklir Korea Utara pada tahun 2017-2018.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder, dimana penulis akan menggunakan data dan fakta dari studi kepustakaan yang dikumpulkan melalui berbagai sumber untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam topik yang diteliti. Berbagai sumber tersebut didapat dari buku, jurnal, statement resmi, website, serta referensi-referensi yang menunjang proses penelitian.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai Batasan penelitian, penulis berupaya membatasi pembahasan agar tidak meluas dan mencegah terjadinya pembahasan yang tidak relevan. Maka ruang lingkup penelitian tentang Upaya Amerika Serikat terhadap Krisis Korea Utara ini akan dibatasi dengan berfokus pada masa kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Periode kepemimpinan Donald Trump dipilih sebagai Batasan penelitian karena pada masa tersebut terjadi hubungan yang panas antara Amerika Serikat dan Korea Utara terutama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai akibat dari program nuklir Korea Utara. Selain itu penulis akan memaparkan beberapa kebijakan Amerika Serikat era presiden sebelumnya dan kebijakan organisasi internasional guna menunjang penelitian. Program-program nuklir Korea Utara sejak negara tersebut berdiri juga akan menjadi pokok bahasan. Kemudian proses Denuklirisasi Semenanjung Korea yang berkaitan dengan Krisis ini tentu akan diperhatikan. Namun, penulis tidak akan mengesampingkan data-data yang ada diluar jangkauan tersebut selama masih relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikannya dalam empat bab, dengan pembahasan BAB I akan berisi tentang; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, dan Sistematika Penulisan dari skripsi ini.

Pada BAB II akan berisi tentang gambaran umum dinamika Krisis Nuklir Korea Utara tahun 2017-2018.

Pembahasan BAB III akan berisi tentang bagaimana Diplomasi Amerika Serikat menggunakan instrumennya dalam menghadapi Krisis Nuklir Korea Utara.

BAB IV akan berisi kesimpulan skripsi yang memuat rangkuman bab-bab sebelumnya serta pembuktian hipotesa.